

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Sumatera termasuk salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan daratannya seluas 473.606 Km. Nama Sumatera dalam berbagai literatur dinamakan Swarnadwipa atau Swarnabhumi, dalam literatur Arab dinamakan Serendib atau Suwarandib, menurut Claudis Ptolomius seorang geografer Yunani Pulau Sumatera dinamakan Trapobana Insula.¹

Di Indonesia telah beberapa kali terjadi pemerintahan perempuan. Di Pulau Sulawesi, enam dari tiga puluh dua Raja Bone (Kerajaan Bugis) sejak kebangkitannya pada abad ke 14 adalah perempuan. Ini dibuktikan oleh James Brooke pada saat James Brooke mengunjungi negara tetangga Bone yaitu Wajo, James Brooke menjumpai bahwa empat dari enam *Arung* (penguasa) besar Wajo adalah perempuan. Kemudian, Pasai pernah mengangkat dua orang penguasa perempuan yaitu Sultanah Nur'illah (wafat 1380) dan Sultanah Nahrasiyyah (wafat 1428), dan juga untuk wilayah Asia Tenggara, perempuan satu-satunya yang menjadi raja di Birma ialah Ratu Shinsawbu (1453-1472) yang memimpin kebangkitan Pegu sebagai kota pelabuhan utama di Teluk Benggali.

Di Nusantara, salah satu wilayah Islam yang menyimpan eksistensi perempuan di dunia politik adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang ada di ujung utara Pulau Sumatera, mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang dalam bahasa Aceh dikenal dengan sebutan Aceh Rayeuk. Kabupaten ini dikenal sebagai Aceh Lhee Sago (Aceh Tiga Segi) atau Aceh Inti (Aceh Proper)² karena Aceh Besar merupakan pusat

¹ Muhammad Ilham dan Yullia Merry, *Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam 1641-1649*, Vol. 10. No. 1 (Jurnal Pendidikan Sejarah, 2021), p. 1-2.

² T. Ibrahim Alfian, "Emas, Kafir dan Maut" dalam *Nusantara* edisi Juli No.2 (Kuala Lumpur : 1972), p.22.

Kerajaan Aceh, pusat ibukota Kerajaan Aceh yakni bernama Bandar Aceh atau *Bandar Aceh Daras-Salam*.³

Secara geografis, Aceh berada di bagian utara Pulau Sumatera. Dalam perjalanan sejarah, Aceh menjadi lokasi bagi berdirinya berbagai kerajaan Islam kecil, contohnya Pasai, Pedir (Pidie), Daya, dan Lamuri.⁴ Seluruh kerajaan Islam di Aceh memiliki peran penting dalam perkembangan kawasan ini, baik dalam agama, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk menjelaskan terlebih dahulu batasan istilah 'Aceh' itu sendiri.

Menurut P.J.Veth, seorang professor etnologi dan geografi dari Universitas Leiden, Belanda, dari semua pemimpin perempuan di Indonesia, pemerintahan perempuan yang paling mengagumkan ada di Kesultanan Aceh Darussalam. Kemunculan perempuan menjadi pemimpin, khususnya di Aceh telah dapat diidentifikasi dari pemerintah Sultan Alaidin Riayat Syah al-Mukammal (1589-1604) yaitu dengan mengangkat Keumalahayati sebagai Laksamana armada laut Aceh. Lalu pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dibentuk Divisi Keumala Cahaya yang beranggotakan para perempuan.⁵

Sebelum terbentuknya kerajaan Aceh, di Aceh terdapat beberapa kerajaan-kerajaan kecil itu di antaranya ada yang terdapat di sekitar Kotamadya Banda Aceh (dahulu Kutaraja) dan ada pula yang terdapat di Aceh Besar seperti, Darul Kamal, Daruddunia, Darussalam dan kerajaan Meukuta Alam.⁶

Aceh memiliki dua perairan utama, yaitu Samudera India serta Selat Malaka, yang menjadikannya lokasi strategis dalam perdagangan

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997) , p.60.

⁴ Prof. Dr., Amirul Hadi, M.A., *Aceh, Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2010) , p.11.

⁵ Muhammad Ilham dan Yullia Merry, *Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam 1641-1649*, Vol. 10, No. 1 (Jurnal Pendidikan Sejarah, 2021), p.3.

⁶ Drs.Mahmunar Rasyid, *Ratu Tajul Safiatuddin Syah Pemimpin Kerajaan Aceh Abad ke-17* (Jakarta : Tarity Samudra Berlian, 2001) , p.7-8.

antara kepulauan Indonesia dan pelabuhan Barat contohnya Parsi, Irak, Mesir, serta Eropa. Melihat letak ini, bangsa Eropa, terutama Portugis pada abad ke-15, tertarik menjadikan Aceh sebagai wilayah jajahan untuk memperoleh hasil bumi dengan harga lebih murah setelah menguasai Goa di India. Selanjutnya, mereka berencana menjelajahi nusantara, termasuk Malaka serta kerajaan Islam di pesisir Sumatera contohnya Aru, Perlak, Teumieng, Pase, Pidie, Daya, serta Aceh.⁷

Peran perempuan di Kesultanan Aceh Darussalam semakin besar, terutama meninggalnya Sultan Iskandar Tsani. Sultan Iskandar Tsani adalah menantu Sultan Iskandar Muda, seorang pangeran dari Kesultanan Pahang, yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1618 M. Pada dasarnya, pengangkatan Sultan Iskandar Tsani menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam mendapat tentangan dari pihak Kaum Wujuddiyah dan Para Menteri yang beranggapan bahwa pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam adalah Putra Aceh. Konflik ini semakin meruncing, sepeninggalan Sultan Iskandar Tsani yang tidak memiliki anak laki-laki yang dapat diangkat sebagai penurus tahta. Akibatnya, para elite politik dan bangsawan saling memperebutkan posisi sebagai Sultan di Kesultanan Aceh Darussalam.⁸

Selama 60 tahun (1641-1699), Empat perempuan (ratu atau sultanah) memimpin secara berurutan di Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultanah Tahul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675), Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Sultanah Inayat Zakiatuddin Syah (1678-1688), serta Sultanah Kamlatuddin Syah (1688-1699).⁹

Sultanah Safiatuddin ialah pemimpin wanita pertama di Aceh dengan masa pemerintahan terpanjang, yakni 34 tahun, yang menandai

⁷ A.Hasjmy, *59 Tahun Aceh merdeka dibawah pemerintah Ratu* (Jakarta : Bulan Bintang, 1977) , p.13.

⁸ Muhammad Ilham dan Yullia Merry, *Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam 1641-1649*, Vol. 10. No. 1 (Jurnal Pendidikan Sejarah, 2021), p. 3.

⁹ Rusdi Sufi, *“Sultanah Safiatuddin Syah”*, dalam *Wanita Ulama Nusantara dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta : Jayakarta Agung Offset, 1994), p. 42.

awal baru dalam riwayat Kesultanan Aceh Darussalam walaupun banyak mendapat kritik. Beliau memiliki karakter dan strategi yang merupakan seni serta pengetahuan untuk memperkuat kekuasaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Sedangkan konsep kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau individu yang memiliki pengaruh untuk memotivasi orang lain demi mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi yang menjadi hal utama adalah sebuah pemerintahan yang dijalankan seorang peminpin. Pemerintahan didefinisikan sebagai organisasi menjadikan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan negara.¹¹

Sultanah Safiatuddin sangat cerdas serta menguasai berbagai bahasa asing, contohnya Arab, Persia, Spanyol, Portugis, serta Belanda. Pada masa pemerintahannya, seperempat anggota parlemen Aceh yang berjumlah 96 orang ialah wanita.¹²

Ketekunan dan rasa tanggung jawab Sultanah Safiatuddin menarik perhatian peneliti untuk mempelajari lebih lanjut kontribusinya. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk menjalankan riset lebih mendalam tentang “ *Kontribusi Sultanah Safiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam Tahun 1641-1675 M* “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Riwayat Hidup Sultanah Safiatuddin ?
2. Bagaimana Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ?

¹⁰ Chaniago, *Perumusan Pemberdayaan Strategi Zakat*, Vol. 12. No. 1 (Jurnal Hukum Islam, 2014), p. 45.

¹¹ Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan*, Vol. 3., No. 1 (Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi : WEDANA, 2017), p. 25.

¹² Criksetra., *Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam (1641- 1699)*, Vol. 10. No. 1, (Jurnal Pendidikan Sejarah , 2021), p. 6.

3. Bagaimana Kontribusi Sultanah Safiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1641-1675 M ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini yaitu dapat menjelaskan mengenai:

1. Riwayat Hidup Sultanah Safiatuddin
2. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam
3. Kontribusi Sultanah Safiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1641-1675 M

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Subkhana Adzim Baqi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2020 pada skripsinya yang berjudul “Empat Sultanah dalam Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699 M) “. Latar belakang penelitian ini menjelaskan awal mula berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam hingga Kerajaan tersebut memperoleh kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda, sebab akibat perempuan diangkat sebagai pemimpin Kerajaan, disertai dengan proses pengangkatannya, kemudian menjelaskan keadaan pemerintah sebelum dan sesudah dipimpin oleh empat Sultanah antara lain Sultanah Safiatuddin Syah, Sultan Naqiyatuddin Syah, Sultanah Zaqiatuddin Syah, dan Sultanah Keumalat Syah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh saudara Subkhana Adzim Baqi sebelumnya. Perbedaannya terletak dari pembahasan yang lebih menekankan pada pengangkatan pemimpin wanita dari ditinjau pro dan kontra yang terjadi pada saat pengangkatan Sultanah Safiatuddin serta Kontribusi Sultanah Safiatuddin selama masa pemerintahannya.

Dalam buku *Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia* (Cetakan Kedua, 2017) karya Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, Ph.D., pada sub-bab ketiga, dijelaskan mengenai peran wanita dalam pembangunan, khususnya pendekatan yang diimplementasikan oleh Sultanah Safiatuddin sepanjang pemerintahannya. Peran Sultanah

Safiatuddin pada Kesultanan Aceh Darussalam sebagai pemimpin memberikan dampak besar, serta mengungkapkan bahwa kesetaraan gender antara pria dan wanita sudah ada sejak masa tersebut. Berbeda dengan buku ini, peneliti memberikan penjelasan lebih mendalam tentang jabatan Sultanah Safiatuddin dan karakteristik yang memberi dampak strategi kepemimpinannya.¹³

Penelitian ini fokus pada 'Kontribusi Sultanah Safiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam tahun 1641-1675 M ini akan mengungkap wacana tentang kepemimpinan perempuan, khususnya kontribusi Sultanah Safiatuddin dalam meredam permasalahan dan mengatur pemerintahan di Kesultanan Aceh Darussalam. Perbedaannya dengan riset lain terletak pada penjelasan mengenai kontribusi Sultanah Safiatuddin sebagai ratu pertama dan pemimpin dengan masa kepemimpinan terpanjang, yaitu 34 tahun (1641-1675 M).

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Gerakan Sosial menurut Anthony Giddens menyatakan bahwasannnya gerakan sosial melibatkan kelompok orang yang berusaha mencari solusi atau menghambat perubahan sosial, dan biasanya muncul setelah adanya keresahan sosial.¹⁴ Menurut Anthony Giddens, Aksi masyarakat merupakan perjuangan bersama dari kelompok yang memiliki tujuan serupa untuk meraih sasaran bersama lewat langkah di luar institusi yang telah ada.
2. Teori Gerakan Sosial McAdam dkk menekankan Tiga elemen utama dalam kajian pergerakan masyarakat, yakni: (1) Tatanan peluang politik dan hambatan yang dijumpai; (2) Jenis kelompok (baik resmi maupun tidak resmi); (3) Tahapan bersama dalam

¹³ Bustaman, Ahmad, *Islam Historis : Dinamika Studi Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Percetakan Galang Press, 2017), p.306.

¹⁴ Sri Ayu Astuti, *Media Sosial Sebagai Ruang Politik Antara Netiket dan Netizen, Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013), p. 208.

mengartikan, menyematkan ciri, dan menyusun masyarakat yang mengaitkan peluang dan aksi ini sering disingkat menjadi kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pemingkaian.¹⁵

3. Teori Gerakan Sosial menurut Macionis adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditunjukan Demi menggerakkan ataupun menghalangi transformasi masyarakat. Berdasarkan pengertian aksi sosial menurut pandangan Macionis, bisa ditarik kesimpulan 2 tanda pokok pergerakan masyarakat, yakni keberadaan kegiatan tertata serta sasaran yang berhubungan dengan modifikasi kemasyarakatan.¹⁶
4. Spencer mengemukakan bahwa pergerakan masyarakat merupakan usaha kolektif untuk merubah struktur kehidupan ke arah yang lebih positif. Karakteristik utama teorinya adalah adanya kerja sama yang bertujuan untuk mewujudkan transformasi menuju sistem yang lebih baik.
5. Ralph Turner serta Lewis Kilian melihat gerakan sosial sebagai bentuk perilaku kolektif yang berbeda dari perilaku 'organisasional' dan 'institusional'. Menurut mereka, gerakan sosial tidak harus berbasiskan organisasi, meskipun tetap melibatkan kerja-kerja terorganisir untuk mengontrol dan berbicara atas nama gerakan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penelitian sejarah, Dibutuhkan struktur konseptual dan teori sebagai sarana untuk pemaparan, kajian, dan

¹⁵ Hasanuddin, *Dinamika dan Pengerucutan Teori Gerakan Sosial*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2004), p. 23.

¹⁶ Sukmana, Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang : Intrans Publishing, 2016), p. 4.

¹⁷ Syawaludin Mohammad, *Sosiologi perlawanan, studi perlawanan Repertoar Petani di Rengas Ogan Ilir Sumatera Selatan*, (Yogyakarta : Deepublish, CV Budi Utama, 2017) p. 31.

penggabungan peristiwa masa lalu.¹⁸ Penelitian tentang kontribusi Sultanah Safiatuddin Pada kerajaan Aceh Darussalam (1641-1675 M), memakai pendekatan deskriptif untuk memeriksa persoalan dalam studi sosial dan ilmu budaya, seperti halnya kebebasan politik, etnis, jenis kelamin, golongan, bangsa, internasionalisasi, kemerdekaan, serta persoalan-persoalan sosial umum.¹⁹

Studi ini bertujuan untuk mengkaji kepemimpinan dan peran Sultanah Safiatuddin di kerajaan Aceh Darussalam, terutama selama masa pemerintahannya (1641-1675 M). Metode kualitatif dipilih sebagai pendekatan yang tepat untuk mengkaji permasalahan ini. Riset ini dijalankan dengan 4 step riset sejarah, yakni:

1. Heuristik, yakni menemukan dan mengoleksi referensi. Riset ini termasuk riset deskriptif, tempat di mana pengkaji menjalankan tinjauan literatur melalui mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan fungsi Sultanah Safiatuddin pada Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1675 M). Informasi didapatkan lewat kajian literatur, dengan menyusun data dari referensi utama dan pendukung.

Referensi utama yang dipakai di antaranya adalah karya tulis A. Hasmjy bertajuk *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu* (1977, Edisi Pertama). Buku ini menguraikan kontribusi perempuan dalam kemajuan serta taktik yang dilaksanakan Sultanah Safiatuddin sepanjang masa pemerintahannya.

Sumber Sekunder yang digunakan penulis diantaranya *Kewajiban Perempuan dalam Ajaran Islam* oleh Asghar Ali Engineer, *Ratu-Ratu Islam yang Terabaikan* oleh Fatima Mernissi, *Riwayat Provinsi Daerah Khusus Aceh* oleh Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan, *Ratu Tajul Safiatuddin Syah: Penguasa Kesultanan Aceh Abad ke-17* oleh Drs. Mahmunar Rasyid, *Interaksi Politik Wanita: Studi*

¹⁸ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), p.26.

¹⁹ Ratna, *Metodologi penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), p.93.

Kepemimpinan Ratu Safiatuddin di Kesultanan Aceh Darussalam Abad ke-17 oleh Marlinda Irwanti, *Sultanah Safiatuddin Syah dalam Cendekiawan Perempuan Nusantara: Dalam Jalur Sejarah* oleh Rusdi Sufi.

2. Verifikasi adalah mengkritik sumber. Dalam langkah ini, peneliti menguji kebenaran sumber untuk memastikan validitasnya. Sumber-sumber tersebut dikritik melalui kritik internal dan eksternal. Kritik eksternal digunakan untuk memahami isi teks.²⁰ Kritik internal bermaksud guna memeriksa validitas isi sumber, meliputi analisis pada isi, bahasa, situasi, serta gagasan atau ide yang terkandung.

3. Interpretasi adalah upaya sejarawan untuk mengidentifikasi faktor penyebab suatu peristiwa. Penulis menafsirkan fakta-fakta yang sudah diuji keabsahannya dan mengkronologikan peristiwa-peristiwa terkait Sultanah Safiatuddin di Kerajaan Aceh Darussalam. Pembahasan peristiwa akan dibagi berdasarkan kontribusinya selama 1641-1675 M, sehingga memberikan hasil konstruksi sejarah yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

4. Historiografi adalah proses menghubungkan peristiwa-peristiwa menjadi rangkaian sejarah. Penulis akan menyusun penelitian secara sistematis, dimulai dengan pendahuluan, diikuti bab-bab yang membahas pokok-pokok pembahasan, dan diakhiri dengan simpulan juga saran dari hasil riset.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ialah:
 BAB I: Pendahuluan (latar belakang, tujuan, benefit, riset sebelumnya, teori, metode, serta sistematika).
 BAB II: Riwayat Hidup Sultanah Safiatuddin (asal-usul, pendidikan, keluarga, wafat).

²⁰ Suharto w Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),p.37.

BAB III: Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam (latar belakang, perkembangan, kehancuran).

BAB IV: Kontribusi Sultanah Safiatuddin (politik, pergerakan, keagamaan).

BAB V: Penutup (simpulan serta masukan)